**Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia**
**Volume 4, Nomor 10, January 2026, Halaman 129-134**
**Licenced by CC BY-SA 4.0**
**e-ISSN: 2986-7002**
**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.18491748

# Pendampingan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Penguatan Desa Tangguh Bencana di Desa Perk. Bukit Lawang

*Community Assistance in the Implementation of Disaster-Resilient Village Strengthening Policies in Perk. Bukit Lawang Village*

**Sri Istiawati[1], Nufaris Elisa[2], Khaira Rizfia Fachrudin [3], Yulkarnaini Siregar[4]**
[1,2,]Institusi afiliasi Universitas Amir Hamzah, Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate
[3]Institusi afiliasi Universitas Universitas Dharmawangsa, Jl. KL. Yos Sudarso Medan
[4]Institusi afiliasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Jl. Balai Desa Mariendal.
[*]Email korespondesi: sriistiawati1962@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pendamping masyarakat implementasi kebijakan desa tangguh bencana di Desa Perk. Bukit Lawang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dapat menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Di Desa Perk. Bukit Lawang belum optimal, pada dimensi komunikasi penyampaian informasi penyampaian informasi oleh Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang yang kurang maksimal, masih kurangnya pada dimensi sumber daya yaitu sumber daya manusia yang kurang jumlah, serta sumber daya anggaran yang terbatas sehingga kurang terpenuhinya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana. Disposisi atau kemampuan para pelaksana dalam menyikapi masalah sudah responsif. Struktur birokrasi menerapkan Standar Operasional Prosedur pada pelaksanaan kegiatan.
**Kata Kunci**: *Implementasi kebijakan penguatan, Tangguh Bencana*

**Abstract**

*This study was conducted to describe community assistance in the implementation of the Disaster-Resilient Village policy in Perk. Bukit Lawang Village. The research method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach. The theoretical framework explains that policy implementation is influenced by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques include literature studies, observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Disaster-Resilient Village policy in Perk. Bukit Lawang Village has not been optimal. In the communication dimension, the dissemination of information by the Perk. Bukit Lawang Village Government has been insufficient. There are also shortcomings in the resource dimension, including an inadequate number of human resources and limited budgetary resources, resulting in insufficient facilities and infrastructure. The disposition, or the ability of implementers to respond to problems, has been responsive. Meanwhile, the bureaucratic structure applies Standard Operating Procedures in the implementation of activities.*
**Keywords:** *Policy Implementation; Disaster Resilience Strengthening*

**Article Info**
Received date: 25 December 2025 Revised date: 30 December 2025 Accepted date: 20 January 2026

## PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengimplementasikan kebijakan Desa Tangguh Bencana (DesTaNa), yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang digunakan untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap masyarakat dan aset-aset vital dari ancaman bencana, serta untuk memperkuat ketahanan komunitas terhadap dampak bencana yang mungkin terjadi. Dengan adanya Desa Tangguh Bencana, diharapkan masyarakat

khususnya tingkat desa atau kelurahan dapat lebih siap dan mampu menghadapi tantangan bencana dengan cara yang lebih terorganisir, efektif, dan berkelanjutan. Dengan adanya Destana, diharapkan mampu memberikan penanggulangan bencana yang semakin lebih baik dengan memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah desa atau kelurahan, Walaupun begitu, keberadaan Destana belum sepenuhnya mampu diterapkan dengan baik. Dalam fakta yang terjadi di lapangan, pelaksanaan Destana, khususnya di desa Perk. Bukit Lawang belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih sering ditemui berbagai kendala. Sehingga orientasi pelaksanaannnya lebih cenderung 'administrative heavy' ketimbang 'substantive heavy'. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, (1) Komunikasi, proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policymaker) kepada pelaksana kebijakan (policyimplementor). (2) Sumber daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. (3) Disposisi, kemauan keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. (4) Struktur birokrasi, mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

## METODE

Penulis dalam menentukan informan dengan pihak yang memiliki pemahaman mengenai Desa Tangguh Bencana (Destana) agar mendapatkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. (1) Kepala Desa Perk. Bukit Lawang, (2) Sekretaris Desa Perk. Bukit Lawang, (3) Ketua Desa Tangguh Bencana Desa Perk. Bukit Lawang, (4) Fasilitator Desa Tangguh Bencana BPBD Perk. Bukit Lawang, (5) Seksi pencegahan dan mitigasi Destana Perk. Bukit Lawang, (6) Seksi logistik dan peralatan Destana Perk. Bukit Lawang, (7) Lembaga Masyarakat Desa Perk. Bukit Lawang dan (8) Tokoh masyarakat Desa Perk. Bukit Lawang. Informan di sini merupakan informan yang secara langsung maupun tidak langsung mengetahui ataupun terlibat dalam pengelolaan serta pengimplementasian Destana di Desa Perk. Bukit Lawang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni ada tiga, diantaranya (1) Studi Kepustakaan. Moleong (2018: 23) menjelaksan bahwa studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan serta penyusunan data atau sumber pendukung yang diperoleh dari buku, media internet, dokumen hingga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. (2) Observasi.

Observasi merupakan langkah pertama dalam proses pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan melalui pemantauan secara tidak langsung turun ke lapangan, tujuannya adalah guna mengetahui kondisi lapangan yang sesungguhnya. (3) Wawancara. Sugiyono (2017: 231) menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data guna mengetahui hal mendalam dari narasumber. (4) Dokumentasi. Rijali (2018: 84) analisis data merupakan upaya guna mencari serta menata secara sistematis dari catatan hasil observasi yang dilakukan, wawancara, guna meningkatkan pemahaman mengenai hal yang diteliti yang disajikan sebagai hasil temuan dengan meningkatkan pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. proses analisis data penelitian terbagi ke dalam empat, diantaranya (1) Reduksi Data. Hardani, etal.(2020:164) menjelaskan bahwa reduksi data merupakan proses pemeilihan, pemusatan perhatian sederhana, abstrak dan transformasi data akan muncul melalui catatan-catatan lapangan. (2) Penyajian data. Sahir (2021: 48) menjelaskan bahwa peyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. (3) Penarikan Kesimpulan. Hardani, etal. (2020: 171) menjelaskan bahwa simpulan yang dibuat haruslah relevan dengan foks penelitian, hasil temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

Gambar 1. Pelaksanaan PKM

Gambar 2. Pelaksanaan PKM

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Implementasi suatu kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Peran dari pelaksana kebijakan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya kebijakan tersebut, karena pada dasarnya peran pelaksana inilah yang menjadi indikator dari keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan tersebut. Komunikasi. Komunikasi dalam kebijakan memuat beberapa dimensi yaitu: transformasi informasi, dan konsistensi informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, terkait komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang baik dalam hal transmisi informasi serta konsistensi dalam penyampaian sebuah informasi terkait kebencanaan selalu mengalami perkembangan. Saat ini Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang semakin memperluas serta terus memaksimalkan penyebaran informasi terkait kebencanaan melalui grup sosial media whatsapp dengan harapan informasi yang diberikan dapat tersampaikan kepada semua pihak yang ditujukan dalam kurung waktu singkat dan cepat serta melakukan sosialisasi secara berkala yang berpusat di kantor Desa Perk. Bukit Lawang.

Dari hasil wawancara serta observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, timbul hambatan yang terjadi dengan sikap pemerintah yang saat ini mengedepankan perkembangan penyebaran informasi melalui grup media sosial whatsapp dan sosialisasi secara berkala di kantor desa Perk. Bukit Lawang, yakni masih ada dan banyak dari masyarakat Desa Perk. Bukit Lawang khususnya lansia gagap teknologi dan masih tidak mau dalam mengembangkan pengetahuannya sehingga informasi-informasi yang disampaikan pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang di grup media sosial whatsapp tidak tersampaikan dengan baik, dan masih banyak masyarakat yang acuh terhadap sosialisasi tentang kebencanaan yang ada dan di selenggarakan di desa karena menurut sebagian masyarakat kurang menarik. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pihak lembaga masyarakat desa (Rukun Warga) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perk. Bukit Lawang serta masyarakat menyatakan bahwa pemerintah sudah cukup konsisten dalam memberikan setiap informasi serta memberikan arahan terkait kegiatan-kegiatan kebencanaan di Desa Perk. Bukit Lawang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti secara langsung, Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang melalui organisasi Desa Tangguh Bencana dalam melakukan sosialisasi terkait kebencanaan dalam pengurangan risiko bencana dilakukan setiap tahun, yaitu di awal tahun, pertengahan tahun, dan penghujung tahun, baik secara langsung maupun online. Dalam kasus yang sama terkadang pemerintah desa memberikan informasi secara berkala kepada lembaga pemerintahan desa dan masyarakat pada musim penghujan dan musim kemarau.

Serta sosialisasi antara Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perk. Bukit Lawang satu kali atau dua kali dalam satu tahun dilakukan pada saat awal tahun untuk mengutarakan setiap rencana kegiatan dan di akhir tahun untuk mengevaluasi kegiatan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan serta merupakan salah satu asepk yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan ketenagakerjaan khususnya perluasan kesempatan kerja. Proses pelaksanaan kebijakan harus cermat dan terarah karena keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaannya kebijakan desa tangguh bencana diperlukan sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Perk. Bukit Lawang sudah tanggap saat terjadinya bencana karena karakter warga desa Perk. Bukit Lawang yang memiliki sikap gotong royong yang masih tinggi, namunbelum tanggap dalam proses pra bencana seperti kegiatan sosialisasi diadakan pemerintah desa. Sumber daya anggaran dan fasilitas yang dimiliki oleh Desa Perk. Bukit Lawang dalam mendukung pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Perk. Bukit Lawang saat ini Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang dalam melaksanakan setiap program atau kegiatan kebencanaan selalu mengusahakan sebaik mungkin dan memaksimalkan setiap anggaran yang tersedia.

Hal tersebut karena pihak pemerintah menyatakan bahwa anggaran yang didapatkan oleh Desa Perk. Bukit Lawang masih belum mampu untuk menyediakan setiap peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan setiap kegiatan khususnya terkait kegiatan pelatihan. Disposisi Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang sebagai pelaksana darikebijakan terkait desa tangguh bencana di Desa Perk. Bukit Lawang sudah mengupayakan untuk selalu menjalankan setiap kegiatan dari kegiatan- kegiatan semaksimal mungkin dengan mengupayakan berbagai cara untuk menghadapi setiap hambatan yang terjadi. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pelaku pelaksana di Desa Perk. Bukit Lawang khususunya organisasi desa tangguh bencana baik dari segi pengetahuan serta pengalaman, dapat dilihat dari setiap program-program atau kegiatan-kegiatan kebencanaan di Desa Perk. Bukit Lawang. Pihak-pihak lainnya seperti lembaga pemerintah desa berpendapat hal yang sama bahwa kesiapan dan keinginan dari Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya khususnya anggota

desa tangguh bencana dan relawan-relawan dari masyarakat Desa Perk. Bukit Lawang memang sudah baik. Ditandai dengan banyaknya program pelatihan kerja untuk anggota desa tangguh bencana dan relawan masyarakat Desa Perk. Bukit Lawang saat ini dengan perkembangan berbagai lembaga pelatihan kerja diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas anggota desa tangguh bencana dan relawan masyarakat Desa Perk. Bukit Lawang serta memperbesar dan memperluas pengetahuan ketangguhan bagi anggota desa tangguh bencana dan relawan masyarakat Desa Perk. Bukit Lawang.

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit unit organisasi dan sebagainya. Kebijakan desa tangguh bencana dapat dilaksanakan apabila ada kewenangan yang diberikan kepada pelaksana, oleh karena itu perlunya struktur birokrasi yang rinci pada organisasi khususnya di pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, desa Perk. Bukit Lawang khususnya organisasi desa tangguh bencana Perk. Bukit Lawang dalam setiap melaksanakan program kerja selalu memulai perencanaan terlebih dahulu dengan merancang kegiatan beserta anggaran sehingga dijadikan sebagai acuan kerja yang di dalamnya terdapat SOP untuk melaksanakan kegiatan yang akan diselenggarakan. Hal tersebut didukung dengan beberapa pernyataan dari pihak pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang. Kegiatan yang dijalankan terkait program-program pelatihan atau program sosialisasi kebencanaan selalu memiliki tujuan yang tegas dan jelas dengan para pelaksana yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan program-program tersebut. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Di Desa Perk. Bukit Lawang.

Berdasatkan hasil penelitian, perangkat desa memberikan pemahaman-pemahaman mengenai faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang. Adapun berbagai hambatan dalam implementasi suatu kebijakan Desa Tangguh Bencana di Desa Perk. Bukit Lawang ini diantaranya (1) Sosialisasi serta pengarahan kepada masyarakat kurang maksimal. Hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan desa tangguh bencana di desa Perk. Bukit Lawang didasari oleh minimnya pengetahuan akan teknologi yang mempengaruhi terhadap informasi-informasi yang diberikan tidak tersampaikan dengan maksimal. (2) Keterbatasan anggaran dan fasilitas. Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang mengakui bahwa keterbatasan anggaran yang menjadikan kurangnya fasilitas yang dimiliki untuk menunjang program- program terkait kebencanaan di Desa Perk. Bukit Lawang. Keterbatasan anggaran dari Dana Desa Perk. Bukit Lawang menjadi penghambat dalam mengembangkan fasilitas yang menunjang program-program pelatihan, seperti peralatan evakuasi. Sehingga pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi setiap kebutuhan program-program kebencanaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Desa Tangguh Bencana di Desa Perk. Bukit Lawang, dapat disimpulkan bahwa: (1) Komunikasi: Implementasi kebijakan menunjukkan adanya kekurangan dalam penyebaran informasi. Masih terdapat masyarakat yang kurang terlibat dan kurang memahami teknologi, terutama kelompok lansia. Meskipun demikian, konsistensi komunikasi antara Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang dan pihak terkait sudah baik. (2) Sumber Daya: Dimensi sumber daya menunjukkan beberapa hambatan, khususnya dalam hal peralatan kebencanaan yang belum memadai akibat keterbatasan anggaran. Namun, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia cukup baik, dengan pengurus dan anggota relawan yang memadai dan memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas meeka.(3) Disposisi: Karakteristik pelaksana kebijakan sudah baik, terbukti dari pelaksanaan program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Perk. Bukit Lawang dan difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Perk. Bukit Lawang. Kompetensi pelaksana kebijakan cukup mendukung

keberhasilan program. (4)Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi menunjukkan adanya aturan dan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan kebencanaan, yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan dengan baik.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Perk. Bukit Lawang sehingga program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan lancar. Terimakasih juga kepada para warga masyarakat dan pihak Desa Perk. Bukit Lawang sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini

## REFERENSI

R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah,17(33), 84.

Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Harfa Creative.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Widodo, J. (2022). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.